

Berbagai Aspek Globalisasi dan Pengaruhnya Pada Tata Hubungan Internasional

Burban D. Magenda*

The aim of the paper is to discuss the trend of globalization from political, ideological, security and defense, economics, socio cultural and international lawpoint of views, and their influences in forming the New World Order. The Trend shows the dominance of the United States as the emerging of the United States as the 'sole superpower' and the spread of 'free market' and liberalism. In terms of international law, there is a need to form interstates regulations regarding the flow of people, capital, informatio and other goods accross national boundaries.

KEYWORDS: Ideological clashes, market economy, human migration.

Sejarah Globalisasi Dan Permasalahannya

Dalam studi tentang globalisasi yang menjamur sekarang, terdapat kesamaan pendapat bahwa sebenarnya proses globalisasi sudah terjadi sejak masa awal dari adanya sistem politik dan kemasyarakatan di dunia. Setelah *city states* (negara kota) di Athena dan Sparta digantikan oleh berbagai imperium, maka perluasan imperium tersebut menandai awal dari proses globalisasi. Beberapa literatur berbicara tentang globalisasi kuno (*archaic globalization*), yang berlangsung sampai kira-kira tahun 1500. ke dalam periode ini

* Penulis adalah Dosen Senior Tetap pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI Jakarta. Menempuh S2 dan S3 pada Stanford University dan Cornell University di Amerika. Pernah menjadi Pembantu Rektor Litbang UNTAG Jakarta, Dekan FISIP dan Pejabat Rektor UNAS Jakarta, anggota MPR RI periode 1992 – 2004, anggota DPR RI 1997 – 2004 dan terakhir menjabat sebagai Ketua Sub Komisi Luar Negeri dan Kepresidenan DPR RI. Saat ini, Penulis adalah staf pengajar di FISIP UI.

misalnya dapat dimasukkan periode Byzantium; Tang dinasti di China; berbagai khalifah Islam yang oleh Janet Abu-Lughod disebut mendahului *world system* yang modern dari Immanuel Wallerstein¹. Singkatnya, berakhirnya globalisasi awal/kuno ditandai oleh bangkitnya kekuatan Barat (*the rise of the West*) dan memudarnya kekuatan-kekuatan yang lain (*the declining of the rest*).

Kebangkitan Barat inilah yang kemudian menandai periode "proto globalisasi" antara tahun 1500-1800 seperti imperium Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Di samping Barat, periode ini memperlihatkan pula kebangkitan baru dalam kekuatan Islam, misalnya imperium Ottoman (Usmaniyah) Turki, kerajaan Mogul di India, dan kerajaan Jawa dan Melayu di Asia Tenggara. Inilah jaman yang disebut periode merkantilisme oleh Wallerstein dan menunjukkan perdagangan dunia pra-industri. Di bidang militer, periode ini memperlihatkan dominasi pasukan kavaleri berkuda di darat yang diperkuat meriam-meriam artileri dan penguasaan dunia kelautan². Pada abad ke-19, khususnya sejak tahun 1800, dimulailah periode "globalisasi modern" menggantikan "proto globalisasi". Dua ciri pokok dari globalisasi modern adalah munculnya negara bangsa (*nation state*) dan terjadinya revolusi industri di bidang teknologi. Demikian pula munculnya *Multi National Company* (MNC) pada masa proto globalisasi seperti *East Trading Company*, VOC, dan lain-lain digantikan oleh MNC baru pada masa globalisasi modern. Pada abad 18 dan 19 adalah *the century of Great Britain*. Memang pada abad ke-17, Belanda sempat menjadi superpower utama dan Amsterdam menjadi pusat bursa dan perdagangan dunia, tapi di abad ke-18 dan 19, peran ini digantikan oleh Inggris dengan London sebagai pusat dunia yang baru.

Globalisasi modern juga ditandai dengan munculnya kekuatan, terutama Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Jepang. AS mulai dengan pandangan *outward looking*, mula-mula dengan doktrin Monroe (benua Amerika untuk bangsa Amerika) yang

¹ Janet Abu-Lughod, *Before European Hegemony: The World System 1250-1350*, Oxford, 1989.

² Judith M. Brown dan Roger Louis (eds), *The Oxford History of The British Empire, The 19th Century*, Oxford, 1999.

kemudian berlanjut dengan perluasan wilayah dengan kemenangan dari Meksiko dan konsolidasi ke dalam melalui perang saudara anti perbudakan dari Presiden Abraham Lincoln (1860). Hal ini kemudian diikuti dengan kemenangan atas Spanyol dengan memperoleh Kuba dan Filipina (1898) yang mengubah AS dari *regional power* menjadi *global power*. Setelah kemenangan dalam Perang Dunia I, peranan global AS ini dicanangkan oleh Presiden Wilson dengan doktrinnya yang terkenal yakni, perdagangan bebas, kemerdekaan dan perdamaian³. Doktrin Wilson inilah yang ikut menciptakan liga bangsa-bangsa (1919) serta mendorong gerakan kemerdekaan di negara terjajah di Asia dan Afrika.

Nasib Jerman dan Jepang sebagai *world power* tidaklah berumur panjang karena sifat ekspansionisnya melahirkan Perang Dunia I dan II. Setelah dipersatukan oleh Bismarck tahun 1870, Jerman dengan cepat menjadi negara industri dan kekuatan utama di Eropa. Namun kekalahannya pada PD I dan tunduknya dalam perjanjian Versailles membuatnya lemah selama tahun 1920-an dan baru bangkit kembali di bawah Hitler pada tahun 1930-an. Tapi semangat ekspansionis membuatnya melancarkan PD II, yang mengakhiri perannya sebagai *global power*. Baru pada dekade 1960-an Jerman bangkit sebagai kekuatan ekonomi Eropa, tapi perannya pada bidang politik dan hankam dunia tidak lagi menonjol. Jepang pun mengalami masa yang singkat sebagai *world power*. Setelah memenangkan peperangan melawan Rusia tahun 1905, Jepang tergelincir ke dalam sifat ekspansionisme dan fasisme yang membawanya ke PD II. Kekalahannya dalam PD II dari sekutu menyebabkan menurunnya peran global Jepang. Barulah dengan perkembangan ekonominya selama tahun 1950-an dan tahun 1960-an, Jepang menjadi *global power* di bidang ekonomi⁴.

Dengan demikian, akhir PD II menjadi titik tolak baru bagi proses globalisasi. Periode ini kemudian dikenal sebagai globalisasi pasca Perang Dunia II dan pasca kolonial karena banyaknya negara

³ Stephen Ambrose, *The Rise of Globalism*, 1972; Michael Mandelbaum, *The Idea That Conquered The World*, 1999; Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, 1995.

⁴ Roger Griffin (editor), *Fascisms*, khususnya bab II dan III, Oxford, 1955.

bangsa baru yang merdeka setelah PD II. Dalam kerangka ini, globalisasi merupakan semacam paradoks. Di satu pihak, ia memperkuat negara bangsa karena berlangsung di antara negara-negara bangsa. Tapi di lain pihak, globalisasi makin mengurangi 'kedaulatan negara bangsa' karena diambil oleh organisasi-organisasi supra nasional, baik yang bersifat regional maupun internasional.

Makin kuatnya organisasi-organisasi internasional dan regional merupakan ciri utama dari globalisasi pasca PD II. Organisasi yang paling penting adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan segera setelah berakhirnya PD II, di San Fransisco (AS). Organisasinya disusun sedemikian rupa sehingga lebih efektif dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang didirikan 1919, yang bubar karena telah gagal mencegah terjadinya PD II, khususnya karena ekspansi Mussolini Italian ke Ethiopia. Di bidang ekonomi juga muncul organisasi-organisasi seperti IMF (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia sebagai hasil perjanjian Breton Woods di bidang militer, muncul organisasi-organisasi seperti NATO, SEATO, CENTO, dan Pakta Warsawa, sedangkan di bidang sosial budaya lahir organisasi-organisasi yang kebanyakan di antaranya merupakan dari PBB, seperti UNESCO, WHO, dan UNICEF.

Ciri lain yang menonjol dari globalisasi pasca PD II adalah munculnya dominasi AS di berbagai bidang kehidupan. Di bidang politik dan militer serta ideologi, ada kompetisi antara blok Barat dan blok Timur (Uni Soviet), sampai pecahnya Uni Soviet tahun 1991. demikian pula di bidang ekonomi ada kompetisi antara sistem *free market* (pasar bebas) dari kapitalisme dengan sistem ekonomi negara dari negara-negara komunis. Tapi setelah tahun 1945 memang terdapat penyebaran yang meluas dari pengaruh AS baik di bidang ekonomi melalui MNC; bidang politik melalui pakta dan perjanjian pertahanan; serta bidang sosial budaya dan *lifestyle* sehingga sering dikatakan telah terjadi "proses Amerikanisasi dari dunia". Inilah yang kemudian membuat ilmuwan seperti Fukuyama berbicara tentang *the end of history* dengan kemenangan kapitalisme atas komunisme serta Mandelbaum tentang ideologi

free market yang menaklukkan dunia⁵. Karena itu, abad 20 sering disebut sebagai “*American Century*” yang menggantikan peran Inggris di abad ke-19. Walaupun demikian, periode pasca PD II juga ditandai oleh munculnya super power lain, yakni Uni Soviet (sampai saat pecahnya tahun 1991) serta *great power* baru seperti Cina (RRC), yang bahkan diperkirakan akan makin menguat pada abad 21 sekarang. Di samping itu muncul pula dalam percaturan dunia negara-negara baru yang kemudian disebut Dunia Ketiga dan bergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) tahun 1961 setelah adanya Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. Organisasi-organisasi keagamaan juga tetap menonjol seperti peran Paus di Vatikan untuk umat Katolik dan munculnya organisasi negara-negara Islam (OKI) di tahun 1980-an. Di bidang ekonomi, Uni Eropa telah pula berkembang menjadi entitas politik, sedangkan di setiap wilayah regional muncul organisasi-organisasi baru seperti Pakta ANDEAN di Amerika Latin; APEC di Asia Pasifik; ASEAN di Asia Tenggara; SAARC di Asia Selatan dan OAS (digantikan oleh Uni Afrika) di benua Afrika. Di Timur Tengah, negar-negara Arab bersatu dalam Liga Arab sedang sampai runtuhnya Uni Soviet, COMEON di Eropa Timur.

Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa *world order* sejak akhir PD II makin kompleks, khususnya sampai tahun 1991, yakni saat pecahnya Uni Soviet. Sejak itu, dunia makin menjadi liberal di bidang ekonomi dan politik serta makin didominir oleh super power yang masih tinggal yakni AS, yang sering kemudian disebut sebagai ‘*hyperpower*’. Untuk membahas lebih lanjut perkembangan terakhir dari tatanan dunia (*world order*) ini di bidang politik ideologi, ekonomi, hankam, dan sosial budaya, berikut ini akan diuraikan per-bidang sampai saat sekarang. Dengan demikian, dapat dilihat perkembangan di tiap bidang serta usaha-usaha agar tatanan dunia baru bisa lebih mewakili kepentingan semua negara yang ada, sehingga tatanan yang multipolar tetap dapat diusahakan penciptaannya.

⁵Michael Mandelbaum, *The Idea That Conquered The World*, 1999; Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, 1995.

I. Bidang Politik-Ideologi

I.1. Bidang Politik

Dua kejadian penting menandai perkembangan politik dunia setelah PD II. Kejadian pertama adalah pembentukan PBB di San Fransisco akhir tahun 1945 yang mengikat hampir semua negara di dunia. Belajar dari kegagalan LBB, maka PBB memiliki Dewan Keamanan dengan lima anggota (negara besar pada waktu itu) yang mempunyai hak veto, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan Cina, serta Majelis Umum (*General Assembly*). Keputusan-keputusannya sangat mengikat dan sudah menjadi hukum internasional, terutama dari Dewan Keamanan. Adanya mekanisme PBB ini serta peranan yang aktif dari Sekjen PBB untuk memonitor perdamaian dunia memungkinkan dicegahnya Perang Dunia Ketiga. Konflik dan perang lokal memang masih terjadi tapi kewenangan Sekjen PBB untuk membawa masalah *urgent* yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia ke sidang Dewan Keamanan PBB telah mencegah terjadinya PD III.

Kendatipun demikian, sempat terjadi beberapa krisis yang melibatkan dua super power yang hampir melahirkan perang dunia baru. Pertama adalah perang Korea, 1950-1953 yang melibatkan AS berhadapan dengan Uni Soviet dan Cina. Krisis kedua adalah pemasangan rudal nuklir Soviet di Kuba tahun 1962, yang akhirnya dicabut setelah diancam AS. Krisis ketiga adalah perang Vietnam (1964-1975) yang berakhir dengan penarikan diri AS dan jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan komunis tahun 1975. Di semua krisis ini ada ancaman perang nuklir. PBB juga tidak mampu mencegah tiga kali perang negara Arab melawan Israel dan sengketa Israel melawan Palestina sampai sekarang. Kelemahan dari PBB adalah sering terjadinya '*unilateral action*' di luar kerangka atau keputusan PBB karena berbagai alasan. Uni Soviet misalnya, merasa memiliki hak untuk intervensi di negara Pakta Warsawa yang ingin reformasi politik. Ini terjadi di Jerman Timur (1953), Hongaria (1956), dan Cekoslowakia (1968). Dunia sudah dibagi super power ke dalam wilayah-wilayah pengaruhnya dan PBB tidak berdaya untuk mencegah intervensi mereka. Intervensi juga dilakukan oleh AS seperti di Granada oleh Presiden Reagen (1984) dan di Panama oleh

Presiden Bush Senior (1990). Setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, AS juga melakukan intervensi yang dikenalkan sebagai '*humanitarian intervention*' (intervensi kemanusiaan) seperti menolong kaum Muslim Bosnia tahun 1995 dan Kaum Muslim Kosovo tahun 1999 dari kekerasan pemerintah Serbia oleh Presiden Clinton⁶.

Sebenarnya, PBB diizinkan oleh pasal 42 Piagam PBB untuk melakukan intervensi demi pemulihan perdamaian dan keamanan saja (*peacekeeping force*) yang dipinjam dari tentara negara-negara anggota. Sehubungan dengan perdamaian internasional ini, Piagam PBB juga mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk *self defense* (bela diri) seperti disebutkan dalam pasal 51. Pasal ini memberi justifikasi bagi lahirnya konsep '*pre-emptive strike*' (serangan mendahului) dari AS di bawah Presiden Bush Junior sekarang, yang secara khusus dicantumkan dalam *Strategic Defense Review* (SDR) Pentagon tahun 2002. Konsep ini sekarang dilaksanakan dengan serangan terhadap rezim Saddam Husein di Irak dengan tuduhan memiliki senjata pemusnah massal sehingga mengancam perdamaian dunia. Seperti halnya intervensi di Bosnia dan Kosovo, serangan militer di Irak juga tanpa dukungan resolusi PBB, walaupun PBB kemudian diberikan peran pokok untuk masa pasca intervensi. Mungkin untuk masa depan, PBB perlu merincikan aspek-aspek perdamaian internasional dan bentuk-bentuk kemanusiaan yang dilanggar sehingga secepatnya dapat meminta negara-negara anggota untuk intervensi di bawah bendera PBB. Juga perlu dipikirkan keperluan pembentukan pasukan PBB yang profesional untuk secepatnya intervensi di negara yang kacau seperti di Somalia, Rwanda, Sierra Leone, dan sekarang di Pantai Gading (di mana pasukan Perancis yang intervensi)⁷.

Kejadian kedua setelah Perang Dunia II yang mempengaruhi perkembangan *world order* adalah terjadinya Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet sejak tahun 1947 sampai pecahnya Uni Soviet

⁶ "Kofi Annan's World Order", dalam *The New Yorker*, 3 Maret 2003, halaman 54 tentang intervensi humanitarian Presiden Clinton.

⁷ *The Economist*, halaman 25-26, tanggal 22 Maret 2003.

tahun 1991. Perang Dingin ini dimulai oleh adanya Doktrin Zhdanov dari Uni Soviet tahun 1947. Tapi dunia kemudian bereaksi terhadap Perang Dingin ini dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti GNB, Uni Eropa, OKI, dan berbagai organisasi regional seperti Uni Afrika, Liga Arab, ASEAN, SAARC di Asia Selatan, dan Pakta ANDEAN. Dunia menjadi multipolar sampai tahun 1991 ketika Perang Dingin selesai⁸.

Masalah yang menjadi tantangan sekarang adalah kecenderungan *hyperpower* dari AS tanpa tandingan dari super power yang lain. Ini terutama menjadi masalah setelah gerakan teror di AS melalui peristiwa 11 September 2001 di New York dan Washington DC. Setelah aksi teror itu, rakyat dan psikologi massa di AS sangatlah '*security-oriented*' sehingga menyetujui pemberantasan teror tanpa kenal batas negara dan juga setuju pelaksanaan '*pre-emptive strike*' seperti terhadap Irak sekarang. Hal ini penting diingat karena berbeda dengan Uni Soviet dulu, kehadiran militer AS sangat mengglobal secara merata sehingga mampu melakukan '*military strikes*' secara bersamaan di berbagai bagian dunia.

Dalam kerangka inilah perlu adanya kerja sama internasional di bawah bendera PBB sehingga *national interests* dari suatu negara (misalnya dalam perang melawan terorisme dapat disatukan dalam program bersama secara internasional). Demikian pula, peran dari organisasi-organisasi regional dan internasional dapat diefektifkan sehingga dapat saling melengkapi dengan sifat tunggal adidaya AS. Misalnya, untuk Asia Tenggara, ada forum ASEAN melalui ARF (*Asian Regional Forum*) sedang untuk Asia Pasifik ada forum APEC. Dengan perluasan anggota NATO, maka AS memiliki *engagement* dengan hampir semua negara Eropa di luar Rusia sedangkan negara-negara Amerika lainnya ada forum OAS (Organisasi Negara-negara Amerika). Dengan demikian, *hyperpower* AS memiliki teman-teman dialog baik di tingkat internasional melalui PBB dan juga di tingkat regional, dalam tatanan dunia baru.

⁸ Brian White et. al., *Issue in World Politics*, Palgrave, New York, 2001.

I.2. Ideologi

Setelah Perang Dunia II, dua macam ideologi hampir-hampir tidak terlihat lagi di dunia. Pertama adalah imperialisme dengan runtuhnya imperium di akhir tahun 1940-an. Dengan munculnya dua super power sejak 1950-an memang muncul pertanyaan apakah Uni Soviet dan AS tidak bisa menjadi imperium baru. Uni Soviet terlihat mengarah pada bentuk Tsar baru sejak Stalin dan juga pemimpin berikutnya, seperti terbukti dengan tindakan militer di Hongaria 1956 dan Cekoslowakia 1968. Dengan runtuhnya Uni Soviet 1991, kekhawatiran ini tidak ada lagi, bahkan sebelumnya di bawah Gorbachev sudah lebih demokratis. Mengenai AS, kekhawatiran ini muncul setelah serangan ke Irak sekarang. Sebab, sebelumnya pun, pada masa penjajahan di Filipina sejak 1898, AS dianggap sebagai *'reluctant imperialist'* dan sudah menjanjikan kemerdekaan. Setelah Perang Dunia II, Pakta-pakta militer banyak yang gagal seperti SEATO di Asia Tenggara dan CENTO di Timur Tengah. Yang berhasil adalah NATO tapi dalam kasus Irak sekarang, NATO pecah dengan Jerman dan Perancis menentang serangan ke Irak tersebut.

Di samping itu, di dalam negeri AS terdapat kekuatan demokratis yang kuat yang menentang kecenderungan imperium, baik dari rakyat dan LSM maupun dari Kongres. Adanya pemilu di semua tingkat yang bersifat *issue-oriented* juga membatasi sifat-sifat pemerintah AS yang agresif. Tapi, ada batasannya yakni jika terjadi aksi terorisme baru di daratan AS, maka psikologi massa di AS akan mendukung tindakan balasan yang keras dari AS dengan menggunakan kekuatan militernya yang global itu, seperti dibuktikan oleh persetujuan rakyat AS terhadap penyerbuan rezim Taliban di Afganistan November 2001 dan serangan terhadap rezim Saddam Husein sekarang.

Dunia juga semakin jarang memiliki rezim ideologi fasis setelah Perang Dunia II. Rezim-rezim fasis di Amerika Latin maupun Afrika di tahun 1960-an sekarang sudah menjadi demokratis dengan sistem pemilu teratur. Yang masih tinggal hanyalah Myanmar yang

perlahan-lahan juga akan berubah. Ideologi lainya juga yang tidak populer lagi adalah komunisme. Yang masih ortodoks dengan cara Stalin adalah Korea Utara di bawah Kim Jong Il. Kuba di bawah Fidel Castro mulai mengadopsi sistem kapitalis terbatas sedang yang sudah menjadi *market socialism* (neo-komunis) adalah RRC dan Vietnam⁹.

Ideologi lain yang makin kurang populer adalah konservatisme. Presiden AS Reagen dan PM Margareth Thatcher dari Inggris dulu cukup populer dengan ideologi konservatif ini. Sekarang Presiden Bush dari AS dikenal sebagai penganut neo-konservatif sedang Thatcher-isme sudah tidak populer di Inggris, misalnya karena kegagalan privatisasi BUMN. Presiden Chirac dari Perancis juga dapat dianggap sebagai neo-konservatif karena masih menganggap perlu peranan ekonomi dari pemerintah.

Ideologi paling populer sekarang adalah gabungan dari neo-liberal yang membela intervensi pemerintah di bidang ekonomi, sosbud, dan 'neo-sosial demokrat' (jalan ketiga dari Anthony Giddens) yang dipraktikkan PM Tony Blair di Inggris dan Kanselir Schroeder di Jerman¹⁰.

Sinkretisme ideologi antara 'neo-liberal' dengan 'neo-sosial demokrat' ini tampaknya juga populer untuk negara-negara sedang berkembang. Bedanya, adalah masuknya unsur nasionalisme di beberapa negara, misalnya Malaysia (yang menolak privatisasi), India (yang ketat terhadap investasi asing), dan Iran.

II. Bidang Hankam

Sejak Perang Dingin, super power yang memiliki kehadiran global adalah AS, yang memiliki armada di semua lautan, pangkalan militer melalui perjanjian multilateral (NATO misalnya)

⁹ Pamela Mar et. al., *China: Enabling a New Era of Change*, John Wiley, Singapura, 2003.

¹⁰ Anthony Giddens, *Jalan Ketiga dan The Third Way and Its Critics Polity*, London, 2001.

maupun bilateral di banyak negara (misalnya dengan Jepang, Korea Selatan, Muangthai, Australia, dan banyak negara Timur Tengah). Ini berbeda dengan super power lainnya yakni Uni Soviet yang memiliki Pakta Warsawa dan juga perjanjian bilateral (lazimnya untuk 25 tahun di bawah Doktrin Brezhnev) tapi tidak memiliki kehadiran militer global yang merata (misalnya tidak punya armada di Lautan Hindia dan Asia Tenggara walaupun ada Armada Pasifik di Vladivostok).

Setelah berakhirnya Perang Dingin, kehadiran militer AS makin menguat, misalnya dengan pakta militer dengan negara-negara baru di Asia Tengah dan tanpa tandingan lagi karena Rusia tidak cukup punya sumber daya ekonomi untuk memelihara Angkatan Bersenjata global. Saingan terhadap AS hanyalah bersifat regional, misalnya dari Cina (RRC) untuk Asia Timur dan Rusia (untuk Eropa dan Pasifik). Dilihat dari besarnya budget militer, budget AS untuk tahun 2003 saja (sekitar 400 milyar US Dollar) sama dengan gabungan budget negara-negara besar lainnya di dunia. Apabila dengan kuota "*military industrial complex*" yang disinyalir Presiden Eisenhower dulu pemakaian teknologi tinggi untuk militer, budget AS cenderung terus meningkat. Untuk Perang Irak sekarang, Kongres dengan cepat menyetujui permintaan Presiden Bush untuk budget sebesar 80 milyar US Dollar¹¹.

Karena itulah, kehadiran global AS di bidang hankam di samping untuk "*national interests*" AS sendiri haruslah diusahakan untuk kepentingan perdamaian dan keamanan internasional secara bersama-sama di bawah naungan PBB. Hal ini makin terasa penting dengan meningkatnya kampanye anti terorisme sekarang sehingga dapat dicegah ramalan Huntington tentang "benturan peradaban" (*clash of civilizations*) maupun "benturan kaum fundamentalis" (*clash of fundamentalism*) dari Tareq Ali.

III. Bidang Ekonomi

¹¹ John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, bab VIII sampai X; Norton, New York, 2002.

Seiring dengan konvergensi ideologi tadi, maka di bidang ekonomi juga terjadi sinkretisme dalam beberapa bidang. Bidang pertama adalah ide tentang *welfare state* (negara kesejahteraan), yang tadinya merupakan kaum Fabian sosial demokrat Inggris, sekarang sudah diadopsi kaum liberal dan neo-konservatif. Presiden Bush di AS di bawah tekanan pemilihan sudah menyetujui anggaran kesehatan yang besar (*Medicare*). Bidang kedua adalah masuknya *market economy* (ekonomi pasar), bahkan di negara komunis seperti Cina dan Vietnam. Bidang ketiga adalah masih perlunya BUMN dan subsidi untuk kepentingan rakyat banyak. Privatisasi Thatcher di Inggris banyak yang gagal, khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, sedang PM Mahatir di Malaysia menolak privatisasi. Di Cina, proses privatisasi BUMN menjadi semakin berhati-hati terutama karena menyangkut tenaga kerja dan pemilikan mayoritas asing. Kita di Indonesia juga perlu berhati-hati dengan privatisasi ini dengan melihat berbagai pengaruhnya. Bidang keempat adalah *state planning and budgetting* yang memang merupakan bagian dari model Soviet dan tidak ada dalam *market economy*. Tapi sifat gabungan ini ternyata baik pelaksanaannya di Inggris, Perancis, maupun negara-negara lainnya. Kita mungkin keliru dengan beberapa bagian dari UU Keuangan Negara yang baru sehingga mengecilkan peranan Bappenas dalam proses *budgetting*, dan memberikannya kepada Departemen Keuangan sehingga menjadi *super minister*. Di AS, masalah budget diurus oleh OMB (*Office of Management and Budget*), yang terpisah dari Departemen Keuangan. Karena itu, perlu dipikirkan kembali pelaksanaan UU Negara tersebut.

IV. Bidang Sosial Budaya Dan Hukum Internasional

Argumen dari kaum anti globalisasi umumnya dari sudut sosbud, misalnya menurunnya daya saing kaum kecil (petani, dll) terhadap kaum global (MNC, dll), kurangnya perlindungan terhadap buruh migran dan sebagainya. Untuk menjawab kritik-kritik tersebut, maka memang perlu kewaspadaan di berbagai hal. Pertama, misalnya, perlu perlindungan terhadap petani domestik, misalnya karena WTO dan AFTA (kompetisi hasil-hasil pertanian

negara lain). Juga perlindungan terhadap buruh migran kita (ilegal dan legal mungkin sekitar dua juta; bandingkan dengan 55 juta Tionghoa perantauan, 20 juta India perantauan, 14 juta perantauan dari Inggris dan tujuh juta perantauan dari AS). Khususnya dengan MOU bilateral dengan tiap negara penerima untuk perlindungan luar negeri dan tindakan tegas terhadap perantau dan pengirim di dalam negeri.

Aspek sosbud yang lain adalah pengaruh media massa seperti VCD, TV, dan surat kabar/majalah yang perlu diatur dalam kerja sama pemerintah dengan kalangan yang bergerak di bidang ini. Dengan demikian, aspek negatif globalisasi dapat diminimalisir sehingga proses globalisasi yang tak terelakkan itu menguntungkan rakyat kita, terutama rakyat kecil.

Di bidang hukum, terdapat masalah-masalah yang makin menonjol; baik pada hukum nasional maupun hukum internasional. Di bidang hukum nasional, Indonesia pada Tahun 2006 mengesahkan misalnya UU Kewarganegaraan yang memudahkan kewarganegaraan bagi anak-anak atau keluarga hasil kawin campur antarnegara. Juga memudahkan masa bekerja bagi tenaga-tenaga migran internasional. Walaupun demikian masih terdapat permasalahan dalam hubungan antarnegara tetangga yang menyangkut tenaga kerja migran, khususnya migran ilegal. Hal ini dihadapi misalnya oleh Amerika Serikat menghadapi migran dari Meksiko sehingga dibuatlah UU pembatasan yang baru. Masalah serupa juga dihadapi oleh Malaysia menghadapi tenaga kerja migran dari Indonesia, misalnya dalam soal status hukumnya, pendidikan untuk anak-anak usia sekolah dan perlindungan kerja. Untuk itu diperlukan hukum Internasional yang lebih tepat dan melindungi tenaga kerja migran sebab sudah dilindungi oleh Konvenan PBB di bidang Hak Asasi Manusia dan Sosial Budaya. Dalam hubungan ini, lembaga-lembaga Internasional dan regional perlu membuat aturan hukum yang melindungi tenaga kerja migran, misalnya yang dipraktekkan oleh Uni Eropa.

Demikianlah berbagai aspek dari pengaruh globalisasi di semua bidang yang menjadi tantangan tidak hanya bagi pemerintahan nasional, tetapi juga bagi organisasi regional dan internasional.

(Endnotes)

- ¹ Lihat Janet Abu-Lughod, *Before European Hegemony: The World System 1250-1350*, Oxford, 1989. Juga, AG Hopkins (ed), *Globalization in World History*, Pimlico, 2002, khususnya bab I dan II.
- ² Lihat misalnya, Antony Giddens, *National State and Violence*. Juga Judith M. Brown dan Roger Louis (eds), *The Oxford History of The British Empire, The 19th Century*, Oxford, 1999.
- ³ Lihat Stephen Ambrose, *The Rise of Globalism*; Michael Mandelbaum, *The Idea That Conquered The World*; juga Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*.
- ⁴ Untuk pembahasan mengenai fasisme, lihat Roger Griffin (editor), *Fascisms*, khususnya bab II dan III, Oxford, 1955.
- ⁵ Lihat Mandelbaum, *op. cit.* dan Fukuyama, *op. cit.*
- ⁶ Lihat "Kofi Annan's World Order", dalam *The New Yorker*, 3 Maret 2003, halaman 54 tentang intervensi humanitarian Presiden Clinton.
- ⁷ Mengenai aspek hukum intervensi Presiden Bush Junior di Irak, lihat *The Economist*, halaman 25-26, tanggal 22 Maret 2003. Mengenai *humanitarian intervention*, lihat Brian White et. al., *Issue in World Politics*, Palgrave, New York, 2001.
- ⁸ Lihat White, *ibid*, khususnya bab I.
- ⁹ Mengenai meningkatnya peran Cina di abad 21, banyak buku membahasnya; misalnya, Pamela Mar et. al., *China: Enabling a New Era of Change*, John Wiley, Singapura, 2003.
- ¹⁰ Lihat Anthony Giddens, *Jalan Ketiga dan The Third Way and Its Critics Polity*, London, 2001. untuk mengatasi krisis

finansial dunia, dia mengusulkan pembentukan bank khusus untuk itu. Pemenang Nobel, Joseph Stiglitz mengusulkan Regional Monetary Fund.

- ¹¹ Mengenai budget militer ini, lihat misalnya John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, khususnya bab VIII sampai X; Norton, New York, 2002.

